

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
RINGKASAN.....	viii
SUMMARY.....	xi
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Originalitas.....	31
1.3. Tujuan Penelitian .....	32
1.4. Manfaat Penelitian .....	33
1.5. Kerangka Konseptual .....	33
1.6. Metode Penelitian .....	42
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	43
1.5.2. Bahan Penelitian.....	45
1.5.3. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	45
1.5.4. Analisis Bahan Hukum.....	45
1.5.5. Pertanggungjawaban Sistematika.....	46

## BAB II DASAR-DASAR FILOSOFIS PENGATURAN SANKSI

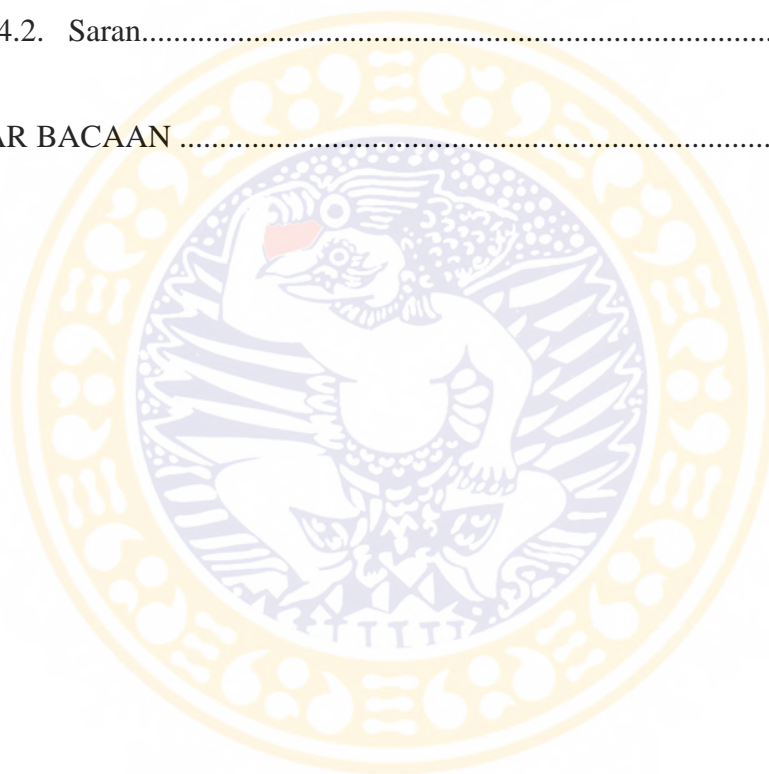
### PEMBUBARAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA

KORUPSI.....	48
2.1. Permasalahan Pidanaan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	48
2.1.1. Pertanggungjawaban Korporasi.....	48
2.1.2. Tujuan dan Fungsi Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	59
2.1.3. Sistem Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	70
2.2. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi.....	79
2.3. Urgensi Penerapan Sanksi Pembubaran Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	94

## BAB III KARAKTERISTIK SANKSI PEMBUBARAN KORPORASI

SEBAGAI SALAH SATU JENIS PIDANA TAMBAHAN .....	118
3.1. Formulasi Pidanaan Korporasi dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	118
3.2. Kebijakan Kriminal ( <i>Criminal Policy</i> ) dalam Hukum Pidana Korupsi di Indonesia.....	132
3.3. Formulasi Pidanaan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.....	152
3.4. Klasifikasi Pembubaran Korporasi Sebagai Sanksi Pidana	

Tambahan.....	169
3.5. Mekanisme Pembubaran Korporasi di Indonesia .....	172
3.6. Konsep Formulasi Aturan Pidana Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.....	184
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>195</b>
4.1. Kesimpulan.....	195
4.2. Saran.....	196
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>.....</b>



## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1847-23).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4144).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan "*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*" (Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).

